

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

**Penulis:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Fungsional, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada pemerintah kota Payakumbuh. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Payakumbuh sebanyak 93 responden yang dijadikan sampel dengan menggunakan analisis Structural Equation Modeling SEM PLS dan pengujian SEMPLS ini menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian uji hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan system pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan, sedangkan pengawasan fungsional dan system akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota Payakumbuh.

Tetty<sup>1)</sup>  
Anne Putri<sup>2)</sup>

**Afiliasi:**  
Magister Manajemen  
Institut Teknologi dan  
Bisnis Haji Agus Salim  
Bukittinggi<sup>1,2)</sup>

**Korespondensi:**  
tettyghazi@gmail.com

**Histori Naskah:**  
Submit: 24-07-2023  
Accepted: 01-08-2023  
Published: 05-08-2023

**Kata kunci:** Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Fungsional, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

---

### Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada era reformasi sekarang ini, pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan ini merupakan rangkaian bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menciptakan good governance dan clean government dengan melakukan tata kelola pemerintah dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerahnya karena dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Pemerintah Kota Payakumbuh menyajikan informasi bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Payakumbuh sembilan tahun terakhir berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Namun dengan prestasi

tersebut belum diimbangi dengan optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah yang masih ditemukan dengan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Walaupun telah mendapat opini WTP masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang dapat berakibat pada kerugian negara, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, juga ditemukan adanya penyimpangan administrasi yang tidak menimbulkan dampak finansial. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa hal dalam pengelolaan keuangan daerah kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Masih lemahnya fungsi verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan SKPD (PPK SKPD) terbukti pada tahun 2022 sering terjadi penolakan /pengembalian SPP dan SPM untuk pengajuan SP2D pengadaan barang dan jasa yang diajukan di Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah kota Payakumbuh karena persyaratan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga memperlambat terbitnya SP2D yang berakibat kecilnya realisasi belanja dan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.
2. Belum maksimalnya pendampingan dan pengawasan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) karena pengawasan yang dilakukan lebih cenderung pada akhir tahun anggaran saja terbukti di tahun 2022 masih ditemukan permasalahan pengelolaan keuangan yang menjadi temuan dari BPK yang harus ditindaklanjuti.
3. Puncaknya salah satu Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tahun 2022 yang menjadi pusat perhatian karena temuan ini ditemukan pada 30 (tiga puluh) SKPD dari 31 (tiga puluh satu) SKPD yang berada di lingkungan pemerintah kota Payakumbuh artinya hanya 1 (satu) SKPD yaitu Dinas Ketahanan Pangan yang tidak terkena temuan ini tentu saja ini menjadi pertanyaan besar dari semua pihak kenapa bisa terjadi. Temuan BPK ini terkait dalam kelebihan pembayaran honorarium pengelola keuangan, ini adalah temuan yang paling banyak terjadi pada SKPD di lingkungan pemerintah kota Payakumbuh tahun 2022 saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Hal ini disebabkan salah tafsir atas aturan yang telah ditetapkan dimana setiap Kepala SKPD telah melimpahkan sebagian wewenangnya dalam pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Bidang/Unit sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Untuk pembayaran honorarium keuangan bagi kepala SKPD hanya sebesar jumlah anggaran yang dikelolanya, namun dalam realisasinya mereka menerima sebanyak pagu anggaran SKPD sehingga terjadi kelebihan pembayaran dan ini merupakan catatan dan temuan tersendiri bagi BPK dalam pemeriksaan. Pemahaman dalam suatu kebijakan atau aturan itu sangat penting bagi keberlangsungan suatu kegiatan, dan hal ini haruslah dilakukan oleh seseorang yang berkompeten di bidangnya. Pengembangan sumber daya manusia semakin penting dan bermanfaat karena tuntutan pekerjaan atau jabatan, sebagai dampak kemajuan teknologi dan semakin ketatnya aturan yang ada. Peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi pemerintahan sangat penting sebagai motor penggerak dan pengendali segala aktivitas organisasi.

Berdasarkan latar belakang fenomena permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Fungsional, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada pemerintah kota Payakumbuh.

## Studi Literatur

### Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Menurut (Kurniawan, 2005) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Selanjutnya menurut (Sinaga, 2014) yang dimaksud efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dari pengertian-pengertian berbagai ahli yang dijabarkan dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan untuk mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan oleh organisasi. Ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah, menurut (Halim,A.,& Syam, 2013), merupakan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan efektif apabila sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. (Mardiasmo, 2002), prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu : Akuntabilitas, Value for money, Kejujuran, Transparansi dan Pengendalian

### Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya. Kompetensi menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural merupakan seorang pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaannya. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentu ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (Wati, 2014).

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dalam melaksanakan tugas untuk mencapai hasil kinerja individu yang efisien dan efektif (Yaswat, n.d.) Sumber daya manusia adalah komponen penting dalam suatu organisasi yang mampu memberikan kontribusi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Nurillah, 2014).

### Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan fungsional terdiri dari Pengawasan

yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ; Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen/instansi pemerintah lainnya; dan Inspektorat Wilayah Provinsi; dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota Madya Kegiatan pelaksanaan Pengawasan Fungsional dilaksanakan berdasarkan rencana program kerja pengawasan tahunan yang disusun sesuai dan sejalan dengan petunjuk MENKO EKUIN dan WASBANG. Usulan program kerja pengawasan tahunan tersebut disusun oleh BPKP menjadi program kerja pengawasan tahunan setelah berkonsultasi dengan aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan. Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Fungsional penting dilakukan untuk menjamin keserasian dan keterpaduan pelaksanaan pengawasan. Kepala BPKP memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS mengenai anggaran pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan.

Hasil pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan program kerja, pengawasan tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus, dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional masing-masing kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BPKP disertai saran tindak lanjut mengenai penyelesaian masalah yang terungkap daripadanya. Khusus untuk masalah yang mempunyai dampak luas baik terhadap jalannya pemerintahan maupun terhadap kehidupan masyarakat, aparat pengawasan fungsional masing-masing melaporkan kepada MENKO EKUIN & WASBANG dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Kepala BPKP.

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Setiap organisasi tak terkecuali pemerintah memerlukan suatu alat pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Pengendalian intern diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengendalian intern juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan” Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan sesuai peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2011). Instansi pemerintah harus memiliki pengendalian internal yang baik, hal ini dilakukan untuk menghindari lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah.

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

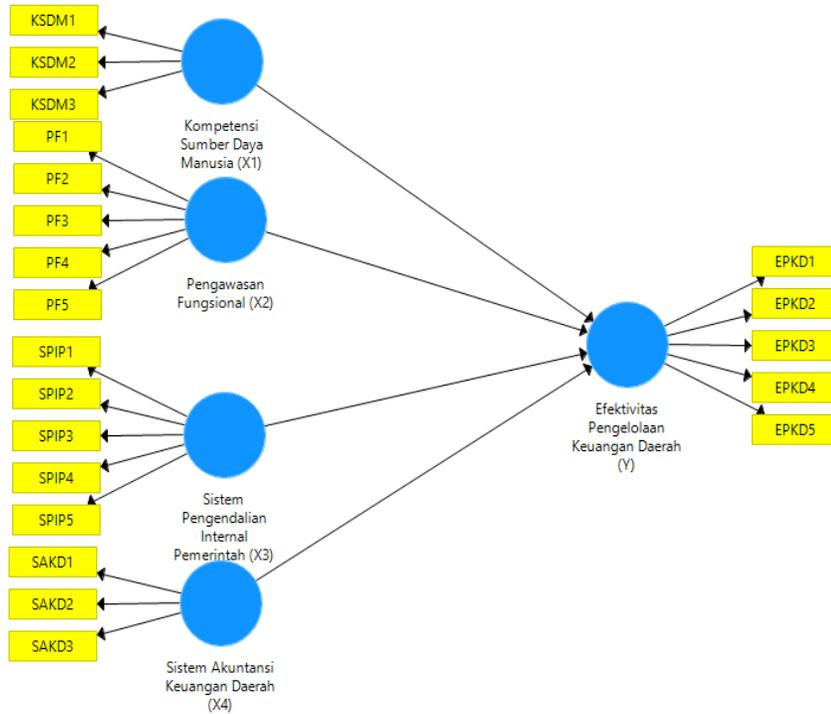
Menurut Darise (Darise, 2008) sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian proses atau prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Pemerintah Daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan populasinya adalah 31 SKPD pada Pemerintah Kota Payakumbuh dan dalam penelitian ini jumlah responden yang dijadikan sampel sebanyak 93 orang (3 orang per SKPD) yang terdiri dari 1 (satu) orang PPTK, 1 (satu) orang PPK dan 1 (satu) orang bendahara pengeluaran dimana seluruh populasi penelitian digunakan sebagai sampel.

Penelitian ini menggunakan menggunakan statistik inferensial diukur dengan menggunakan software SmartPLS mulai dari pengukuran model (outer model), struktur model (inner model) dan pengujian hipotesis (Ghozali, I., & Hengky, 2015). PLS menurut (Ghozali, I., & Hengky, 2015) (Ghozali, I., & Hengky, 2015) Equation Modeling (SEM) berbasis kovarian menjadi berbasis varian.

SEM PLS yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. PLS merupakan metode analisis yang powerfull, tidak harus memenuhi persyaratan asumsi normalitas data dan ukuran sampel tidak harus besar. PLS selain dapat digunakan sebagai konfirmasi teori juga dapat digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada landasan teorinya atau untuk pengujian proposisi dengan diagram jalur model sebagai berikut:



**Gambar 1. Diagram Jalur Model**  
**Sumber: SEMPLS, 2023**

**Hasil dan Pembahasan**

**1. Uji Outer Model (Measurement Model)**

Sebelum dilakukan pengukuran, perlu dilakukan pengujian kelayakan data dengan mengukur validitas dan reliabilitas variabel. Uji outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Hasil uji validitas dan reliabilitas dijelaskan sebagai berikut:

**a. Validitas Konvergen (Convergent Validity)**

Validitas konvergen ditunjukkan dengan korelasi antara indikator dengan variabel laten.

**Tabel 1. Hasil Outer Loading Faktor**

Matrik	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Pengawasan Fungsional	Sistem Akuntansi keuangan Daerah	Sistem Pengendalian Internal pemerintah
EPKD1	0.827				
EPKD2	0.920				
EPKD3	0.898				
EPKD4	0.842				
EPKD5	0,860				
KSDM1		0.859			
KSDM2		0.742			
KSDM3		0.888			

PF1			0,810		
PF2			0,807		
PF3			0,835		
PF4			0,788		
PF5			0,824		
SAKD1				0,628	
SAKD2				0,895	
SAKD3				0,916	
SPIP1					0,806
SPIP2					0,804
SPIP3					0,808
SPIP4					0,753
SPIP5					0,872

**Sumber:** Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen pada table 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa semua indikator mempunyai faktor loading lebih besar dari 0,5. Hasil ini menunjukkan bahwa semua indikator telah memiliki validitas konvergen yang baik. Dengan demikian, indikator valid dalam mengukur masing-masing variabel latennya. tetapi untuk variabel SAKD1 dengan nilai loading faktor 0,628 harus dieliminasi karena memiliki outer loading < 0,7 yang akan mempengaruhi nilai uji reliabilitas (nilai composite reliability yang harus mempunyai nilai diatas 0,7).

**b. Uji Diskriminan Validity**

Pada penelitian ini nilai akar kuadrat AVE pada variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah 0.870 . Nilai tersebut lebih besar dari nilai korelasi antara efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan variabel lainnya.

**Tabel 2. Average Variance Extracted (AVE)**

Constrcut Reliability and Validity					
Matrix					
	Cronbach' Alpha	Rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)	
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0,919	0,920	0,940	0,757	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,779	0,811	0,870	0,692	
Pengawasan Fungsional	0,873	0,883	0,907	0,661	
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,850	0,860	0,930	0,869	
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,868	0,869	0,905	0,655	

**Sumber:** Hasil Pengolahan Data, 2023

Nilai akar kuadrat AVE pada variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0.832 . Nilai tersebut lebih besar dari nilai korelasi antara variabel laten lainnya. Dengan demikian nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari nilai korelasi antar variabel dengan variabel lainnya. Artinya bahwa seluruh variabel laten dalam penelitian ini mempunyai validitas diskriminan yang baik.

nilai reliabilitas composite seluruh variabel laten berkisar antara 0,870 sampai dengan 0,940 artinya bahwa keseluruhan nilai reliabilitas composite lebih besar dari 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel laten mempunyai reliabilitas composite yang baik.

**c. Composite Reliability**

Kelompok Indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki reliabilitas komposit  $\geq 0,7$  meskipun bukan merupakan standar absolut. Hasil reliabilitas komposit dipaparkan pada Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3. Nilai Reliabilitas Masing-Masing Variabel Penelitian**

Construct Reliability and Validity Matrix				
Matrix	Cronbach' Alpha	Rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Efektivitas Pengelolaan Keuangan daerah	0.919	0.920	0.940	0,757
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.779	0,811	0.870	0,692
Pengawasan Fungsional	0.873	0.883	0.907	0,661
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0.850	0.860	0.930	0,869
Sistem pengendalian Internal Pemerintah	0.868	0.869	0.905	0,655

**Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023**

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai reliabilitas composite seluruh variabel laten berkisar antara 0,870 sampai dengan 0,940 artinya bahwa keseluruhan nilai reliabilitas composite lebih besar dari 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel laten mempunyai reliabilitas composite yang baik.

**d. Uji Inner Model (Structural Model)**

Inner model bertujuan untuk melihat hubungan antar konstruk laten. Pengujian model struktural (inner model) dilakukan melalui:

**a. Pengujian R-square**

**Tabel 4. Nilai R<sup>2</sup>**

R Square Matrix		
	R Square	R Square Adjustive
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.709	0.696

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data nilai  $R^2$ , variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah dijelaskan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, pengawasan fungsional, Sistem pengendalian internal pemerintah, dan system akuntansi keuangan daerah sebesar 0.709 atau 70,9 persen sisanya 29,1% persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

### b. Pengujian Q-Square

**Tabel 5 Nilai Q-Square**

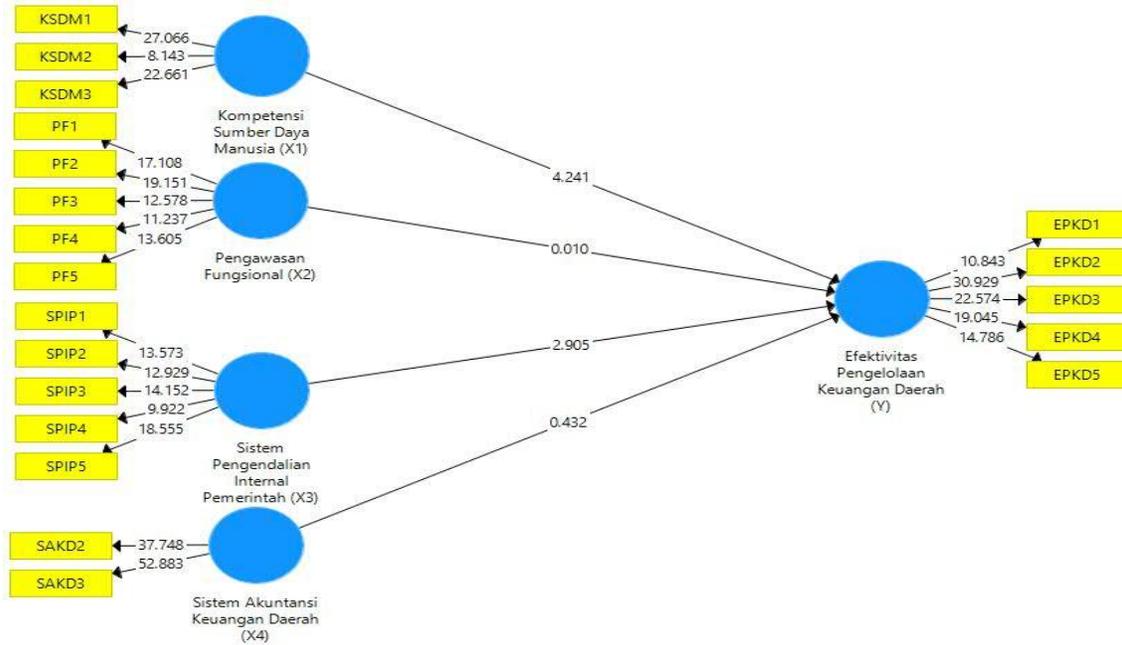
Construct Crossvalidated Redundancy			
Total	SSO	SSE	$Q^2 (= 1-SSE/SSO)$
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	465.000	224.479	0,517
Kompetensi Sumber Daya Manusia	279.000	279.000	
Pengawasan Fungsional	465.000	465.000	
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	186.000	186.000	
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	465.000	465.000	

**Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023**

Nilai Q-square sebesar 0.517 ( $Q^2 > 0$ ) yang artinya kompetensi sumber daya manusia, pengawasan fungsional, sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah dalam memprediksikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah tergolong kedalam kategori sedang, artinya variabel dan data bisa memprediksi model dengan baik sehingga menunjukkan bahwa model memiliki predictive relevance yang baik.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil uji hipotesis dipaparkan pada gambar 3 dan Tabel 6 sebagai berikut.



**Gambar 2. Diagram Jalur Final**  
**Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023**

**Tabel 6. Hasil Path Coefficient Model Jalur**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV)	P Values
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)- > Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,513	0,524	0,121	4,241	0.000
Pengawasan Fungsional (X2) - > Efektifitas pengelolaan keuangan Daerah (Y)	-0,001	0,006	0,116	0,010	0,992
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X4)- > Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,054	0,038	0,124	0,432	0,666
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)- > Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,353	0,343	0,122	2,905	0.004

**Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023**

Dari Tabel 6 dapat diambil kesimpulan hipotesis yang dilakukan:

1. Uji hubungan antar variabel menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah positif (0,000) dan signifikan pada  $\alpha = 0,05$  dengan nilai statistic  $4,241 > 1,96$ , nilai *p-value*  $0,000 < 0,05$  dan sampel asli 0,513 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima.
2. Uji hubungan antar variabel menunjukkan bahwa pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah positif (0,992) dan tidak signifikan pada  $\alpha = 0,05$  dengan nilai statistic  $0,010 < 1,96$ , nilai *p-value*  $0,992 > 0,05$  dan sampel asli - 0,001 artinya hipotesis kedua ditolak.
3. Uji hubungan antar variabel menunjukkan bahwa system pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah positif (0,004) dan signifikan pada  $\alpha = 0,05$  dengan nilai statistic  $2,905 > 1,96$ , nilai *p-value*  $0,004 < 0,05$  dan sampel asli 0,353 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima.
4. Uji hubungan antar variabel menunjukkan bahwa system akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah positif (0,666) dan tidak signifikan pada  $\alpha = 0,05$  dengan nilai statistic  $0,432 < 1,96$ , nilai *p-value*  $0,666 > 0,05$  dan sampel asli 0,054 artinya hipotesis keempat ditolak.

## Pembahasan

### Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Dilihat dari uji hipotesis yang telah dilakukan, ditemukan hasil penelitian bahwa kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif (0,000) dan signifikan pada  $\alpha = 0,05$  dengan nilai statistic  $4,241 > 1,96$ , nilai *p-value*  $0,000 < 0,05$  dan sampel asli 0,513 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama didukung atau diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Annie Mustika Putri dkk, 2023) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada propinsi Riau, hal ini berarti semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dalam suatu instansi maka akan semakin tinggi juga tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan, kemudian hasil penelitian (Tanzerina & ', 2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau.

Bila dilihat dari hasil TCR diperoleh tingkat rata-rata skor kompetensi sumber daya manusia sebesar 4,3 dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 85,9. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sudah baik. Bila dilihat dari nilai skor tertinggi terdapat pada pernyataan 1 (satu) dan 3 (tiga) artinya responden menyetujui Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan juga menyetujui bahwa Dalam pelaksanaan tugas diselesaikan secara tepat waktu dan efektif. Sedangkan untuk nilai skor terendah terdapat pada pernyataan 2 (dua) artinya responden tidak banyak yang setuju bahwa di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Jika ada peraturan baru tentang keuangan daerah, pegawai pada bagian keuangan/akuntansi mendapat sosialisasi dan atau diklat.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. Kompetensi sumber daya manusia sangat berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Bila kompetensi sumber daya manusia baik, maka pengelolaan keuangan akan baik dan efektif. ASN yang mempunyai kompetensi sumber daya manusia yang baik maka dapat mempengaruhi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di suatu pemerintah daerah Artinya semakin baik kompetensi sumber daya manusia seorang ASN maka efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik pula. Sebaliknya semakin rendah kompetensi sumber daya manusia ASN maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga semakin rendah / tidak efektif.

### **Pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah**

Dilihat dari uji hipotesis yang telah dilakukan maka ditemukan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dimana Nilai t statistik sebesar 0,010 lebih kecil dari t tabel (1,96) dan p-value 0,992 > alpha 0.05 dengan nilai Nilai original sample sebesar -0,001 sehingga disimpulkan bahwa hipotesis kedua tidak didukung atau ditolak dimana pengawasan fungsional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Annie Mustika Putri dkk, 2023) dimana pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Propinsi Riau..

Bila dilihat dari hasil TCR maka didapati informasi bahwa tingkat rata-rata skor variabel pengawasan fungsional adalah sebesar 4,1% dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 81,2 menunjukkan bahwa dengan kategori baik.Skor rata-rata tertinggi ada pada pernyataan 2 (dua) artinya responden menyetujui Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program sedangkan skor rata-rata terendah terdapat pada pernyataan 3 (tiga) artinya responden kurang menyetujui SKPD telah melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh artinya pengawasan fungsional tidak berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah di pemerintah kota Payakumbuh.

### **Pengaruh system pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah**

Dilihat dari uji hipotesis yang telah dilakukan ditemukan hasil penelitian bahwa system pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif (0,004) dan signifikan pada  $\alpha = 0,05$  dengan nilai statistik 2,905 > 1,96, nilai p-value 0,004 < 0,05 dan sampel asli 0,353 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga didukung atau diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bay & Tunti, 2019) bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.,hal ini berarti semakin baik system pengendalian internal pemerintah yang dimiliki dalam suatu instansi maka akan semakin baik juga tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan,kemudian hasil penelitian (Iskandar et al., 2015)

menyatakan bahwa system pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di kota Pekanbaru dan juga hasil penelitian dari (Yaswat, n.d.) menyatakan bahwa system pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Perangkat Kerja di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat.

Bila dilihat dari hasil TCR diperoleh tingkat rata-rata skor system pengendalian internal pemerintah sebesar 4,1 dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 81,8. Hal ini menunjukkan bahwa system pengendalian internal pemerintah pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sudah baik. Bila dilihat dari nilai skor tertinggi terdapat pada pernyataan 4 artinya mayoritas responden menyetujui Sistem Informasi yang dipakai instansi haruslah berfungsi dengan baik Sedangkan untuk nilai skor terendah terdapat pada pernyataan 2 (dua) artinya responden tidak banyak yang setuju bahwa di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh ada penilaian terhadap resiko. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa system pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. System pengendalian internal pemerintah sangat berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin bagus penerapan sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin efektif juga pengelolaan keuangan daerah Artinya semakin baik system pengendalian internal pemerintah maka efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik pula. Sebaliknya semakin rendah system pengendalian internal pemerintah maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga semakin rendah / tidak efektif.

### **Pengaruh system akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah**

Dilihat dari uji hipotesis yang telah dilakukan maka ditemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dimana Nilai t statistik sebesar 0,432 lebih kecil dari t tabel (1,96) dan p-value 0,666 > alpha 0.05 dengan nilai Nilai original sample sebesar 0,054 sehingga disimpulkan bahwa hipotesis keempat tidak didukung atau ditolak dimana sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khafiza, 2018) dimana system akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas/instansi di Kabupaten Jepara kemudian juga tidak sejalan dengan hasil penelitian (Putri dkk, 2023) bahwa system akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada propinsi Riau.

Bila dilihat dari hasil TCR maka didapa informasi bahwa tingkat rata-rata skor variabel system akuntansi keuangan daerah adalah sebesar 4,1% dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 82,7 menunjukkan bahwa dengan kategori baik. Skor rata-rata tertinggi ada pada pernyataan 3 (tiga) artinya responden menyetujui pernyataan “Pada dinas ini dilakukan klasifikasi atau transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya” sedangkan skor rata-rata terendah terdapat pada pernyataan 1 (satu) artinya responden kurang menyetujui pernyataan bahwa “Pada dinas ini dilaksanakasn pengidentifikasian terhadap pencatatan”.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh artinya bahwa ASN memahami dengan baik sistem

akuntansi keuangan daerah namun tetap tidak bisa meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota Payakumbuh. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia seorang ASN maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik pula. Sebaliknya semakin rendah kompetensi sumber daya manusia ASN maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga semakin rendah. Kemudian Pengawasan fungsional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota Payakumbuh artinya ada / tidak ada dilakukan pengawasan fungsional tidak akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah di pemerintah kota Payakumbuh. Selanjutnya System pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Payakumbuh. Semakin baik system pengendalian internal pemerintah terhadap ASN maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik pula. Sebaliknya semakin rendah system pengendalian internal pemerintah terhadap ASN maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga semakin rendah / tidak efektif. Terakhir System akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Payakumbuh artinya bahwa ASN memahami dengan baik sistem akuntansi keuangan daerah namun tetap tidak bisa meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

### **Daftar Pustaka**

- Abdillah, Willy, & J. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. Ed.I. Yogyakarta: ANDI.*
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.*
- Annie Mustika Putri dkk. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Arikunto. (2012). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta.*
- Bay, P. G., & Tunti, M. E. D. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 138–147.
- Ghozali, I., & Hengky, L. (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. BP Undip. Semarang Harnanto. 2017. Akuntansi Biaya.*
- Ghozali, I. (2013). (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*
- Ghozali I. (2008). *Structural Equation Modelling Edisi II Universitas Diponegoro Semarang.*
- Ghozali I. (2011). *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. (2014). (2014). *Partial Least squares structural equation modeling (PLS-SEM) An emerging tool in business research.*
- Hair, J.F. Jr., Black, W.C., Babin B.J., Anderson. R.E. and Tatham. R.I., (2008). *Multivariate*

- Data Analysis.6th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall.Kaihatu. T. S. (2006. March). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan . 8(1), 1-9.*
- Husaini, H., Aisyah, S., & Verawati, H. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Universitas Bengkulu. *Jurnal Fairness*, 5(2), 47–68. <https://doi.org/10.33369/fairness.v5i2.15306>
- Iskandar, J., Retnawati, V., & Darlis, E. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jom Fekon*, 2(2), 1–15.
- Khafiza, L. S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2(1), 1693–8275. <http://ejournal.unisnu.ac.id/jra/>
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.*
- Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. *JOMFekom*, 4(1), 571–586. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach. John Wiley and sons,inc. : London.*
- Sinaga. (2014). *Defenisi Pengertian Efektivitas (http://blog.wordpress.com/diakses tanggal 18 September 2014 pukul 09.00 WIB.*
- Sistem, P., Intern, P., Melekat, P., Pengawasan, D. A. N., Efektivitas, T., & Keuangan, P. (n.d.). *Oleh: Nindya Utami Pembimbing: Yessi Mutia Basri dan Al Azhar L. 910–922.*
- Sutama. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Kuntitaif,Kualitatif,PTK, dan R&D Kartasura: Fairuz Media.*